

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Grobogan

Halaman 25

Capaian PBB Masih Rendah

43 Persen dari Target

GROBOGAN- Capaian pendapatan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Grobogan pada setengah tahun berjalan masih jauh dari harapan. Dari Januari hingga kini, pendapatan daerah dari PBB baru masuk 43 persen dari target.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Wahyu Susetijono mengatakan pihaknya sudah mengundang beberapa kepala desa yang capaiannya masih rendah. Kepala desa tersebut kami diimbau agar dapat segera melunasi PBB di wilayahnya.

"Saat ini baru masuk Rp 10,98 miliar atau sekitar 43 persen dari target yang kami tentukan. Kami minta agar kades-kades, terutama yang capaiannya masih rendah, untuk segera melunasi PBB. Sebab, masa pajaknya masih sampai September mendatang," kata Wahyu, kemarin.

Saat ini pihaknya hanya bisa menagih kepala desa agar capaian tersebut dapat diraih. Di samping itu, BPPKAD akan memanggil kades untuk mencari pokok permasalahannya agar dapat dicarikan solusinya.

Menurutnya, sesuai Perda No 1 tahun 2012 pihaknya akan memberikan denda sebesar dua persen perbulannya dari total PBB di desa bila ada keterlambatan. Sementara maksimal masa denda yang diberikan 24 bulan.

"Desa yang dapat tepat waktu pembayaran PBB-nya juga kami beri apresiasi. Namun bagi desa yang terlambat tentu ada pemberian sanksi, sesuai perda. Kami akan terus mengevaluasi dan mencari inovasi baru agar target PBB tercapai," ujarnya.

Kepala Bagian Pemerintah Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti, beberapa waktu lalu mengatakan, *incumbent* yang kembali mencalonkan diri sebagai peserta Pilkades Serentak diminta untuk membereskan PBB di wilayahnya lebih dulu.

"Ini menjadi salah satu persyaratan wajib bagi *incumbent* yang akan mencalonkan diri kembali," ujar Daru. (zul-61)